POS KOTA

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ratusan Bus TransJakarta Harus Uji Kelayakan

JAKARTA (Pos Kota) – Kelayakan ratusan bus Transjakarta gandeng yang pengadaannya bermasalah pada tahun 2013 harus diuji ulang. Pasalnya moda angkutan massal tersebut telah berbulan-bulan tidak dioperasikan.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Antonius NS Kosasih, mengatakan hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi bus tak rusak dan layak jalan. Pengujian mulai dari bagian mesin sampai bodi bus.

"Terlepas dari arahan Pemprov DKI, bus apapun yang akan kami gunakan harus dipastikan kondisi dan kelayakannya. Komponen yang rusak harus segera diperbaiki sepenuhnya agar aman dioperasikan," ujar Kosasih, Minggu (26/4).

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, ogah mengoperasikan 531 bus Transjakarta yang pengadaannya bermasalah pada 2013. Orang nomor satu di ibukota ini beralasan bahwa bus tersebut berisiko jika dioperasikan. Lantaran banyak dari elemen bus yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, sudah berkarat.

Kebijakan mantan Bupati Belitung Timur ini mendapat perlawanan hukum dari perusahaan penyedia moda angkutan massal tersebut. PT Ifani Dewi membawa masalah ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sesuai keputusan BANI, Pemprov DKI diperintahkan membayar Rp7,6 miliar kepada PT Ifani.

TAK BISA JALAN

Permasalahan pengadaan bus Transjakarta pada tahun 2013 mencuat pada awal Februari tahun lalu. Diawali dengan ditemukannya banyak kerusakan pada sebagian dari 90 bus TransJakarta baru yang disimpan di pool Unit Pengelola Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur.

Padahal baru sehari diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Jokowi pada 15 Januari 2014. Selain itu dari 30 bus gandeng yang diluncurkan, 12 di antaranya tak bisa jalan esok harinya.

Dugaan adanya korupsi terhadap proyek pengadaan bus ini pun menyeret Udar Pristono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai tersangka. (o)